



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 Pswt 5200 (021) 3842234 (direct) FAKSIMILE (021) 3846402, 3454640
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S - 1202 /PB/2018

1 Februari 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal : Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi *Debt Swap*
Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara Pada Pemerintah Daerah

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Sebagaimana Daftar Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan selesainya verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan *debt swap* Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. BPKP melalui Surat Nomor S-2380/D3/01/2017 tanggal 30 November 2017 hal Ikhtisar Hasil Verifikasi atas Pelaksanaan *Debt Swap* pada Pemerintah Daerah Tahun 2017 telah menyampaikan laporan hasil verifikasi atas pelaksanaan *debt swap* Pemerintah Daerah (Pemda) dengan kesimpulan bahwa terdapat 6 Pemda yang telah merealisasikan seluruh kewajiban *debt swap* sesuai kriteria Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) No. 176/PMK.05/2016 dan 1 Pemda yang realisasi pelaksanaan *debt swap*nya kurang dari kewajiban *debt swap*.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, terhadap 6 (enam) Pemerintah Daerah yang pelaksanaan *debt swap*nya telah sesuai ketentuan PMK No. 176/PMK.05/2016 disampaikan bahwa penyelesaian restrukturisasi pinjaman akan segera diproses lebih lanjut.
3. Rincian hasil verifikasi pelaksanaan *debt swap* masing-masing Pemda disampaikan pada daftar terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Sistem Manajemen Investasi

Ari Wahyuni
NIP 19661109199010200

Tembusan:

1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S - 1202 /PB/2018

Tanggal : 1 Februari 2018

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Gubernur Aceh;
2. Bupati Aceh Selatan;
3. Walikota Pariaman;
4. Walikota Banjarmasin;
5. Walikota Palu;
6. Walikota Makassar.